



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900 / 12 / I / 2025 /BPKPD

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perlu Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886) ;

5. Undang –Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Kesatuan republik Indonesia) Tahun 2009 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5038)
6. Peraturan komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatul Sipil Negara (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297) ;

12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2024 Nomor 136 ;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I,II, III, dan Lampiran IV Keputusan ini bagian yang tidak terpisahkan .
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) Sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib di sediakan dan diumumkan .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 7 Januari 2025



**An BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Pit. KEPALA BADAN,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN , S.E. M.Ak.M.Si

Pangkat : Pembina TK.1 IV/b

NIP : 19830525 200604 1 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi di Makassar;
3. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi SP Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Masing Masing yang bersangkutan di tempat;
7. Arsip.

LAMPIRAN 1**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH****NOMOR : 900/ 12/ I/ 2025 / BPKPD****TENTANG****DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH****TAHUN ANGGARAN 2025****DAFTAR INFORMASI PUBLIK****A. INFORMASI BERKALA**

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Informasi tentang Profil Badan Publik	Memuat alamat, lokasi dan Tempat	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Benteng, 4 Januari 2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
2	Struktur Organisasi	Dokumen yang memuat tentang struktur organisasi berdasarkan PERBUP No 140 tahun 2021 tentang kedudukan tugas dan fungsi serta tata cara yang terdiri dari : Kepala Badan , Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah ,Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Benteng, 4 Januari 2024	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
3	Informasi Tentang Peraturan, Keputusan atau Kebijakan yang mengikat atau yang diterbitkan	1 Penetapan SK Pejabat Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2024	Kabid Perbendaharaan Daerah	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		2 Penetapan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2024	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com



NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 Penetapan SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2025	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		4 Penetapan SK Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Kabid Perbendaharaan Daerah	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		5 Penetapan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		6 Penetapan SK Pemeriksa Hasil pekerjaan Lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		7 Penetapan SK Pemeriksaan Barang dan Jasa Lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		8 Penetapan Pengurus Barang di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2025	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		9 Penetapan Bendahara di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Kabid Perbendaharaan Daerah	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		10 Penetapan SK Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Kabid Anggaran Daerah	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		11 Penetapan SK Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		12 Penetapan SK Daftar Informasi Publik DIP Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com



NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
		13 Penetapan Maklumat Pelayanan Tahun 2025	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
4	Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2023 Inspektorat Daerah	Memuat uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan dan digunakan untuk menganalisis kebutuhan pegawai, penetapan kompetensi dan syarat dari suatu jabatan, serta sebagai indikator kinerja pegawai.	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Benteng Tahun 2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
5	Renstra BPKPD(2021- 2026)	Merupakan rencana kerja kegiatan dan anggaran dan merupakan perencanaan dokumen organisasi BPKPD dalam periode tertentu yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik langsung atau tidak langsung dan melalui rencana kerja yang diharapkan dapat memberikan kejelasan baik institusi pemerintah atau mitra kerja	Kasubag Program	Benteng 22 September 2021	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 5 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023	1. Acuan untuk mengukur capaian kinerja yang telah direncanakan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Kasubag Program	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 5 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		2. Acuan untuk mengetahui ukuran informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan bertanggung jawab					http://bpkpdselayar.com
7	Perjanjian Kinerja (Perjakin) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025	1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;	Kasubag Program	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;					http://bpkpdselayar.com
		3. Dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;					http://bpkpdselayar.com



NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;					http://bpkpdselar.com
		5. Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai					http://bpkpdselar.com
8	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Tahun 2025	1. Acuan sekaligus parameter untuk mengukur apakah sebuah rancangan / desain sudah sesuai atau belum. 2. Gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditentukan	Kasubag Program	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselar.com
9	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	RUP dapat dilihat di website https // sirup lkppd.co.id yang isinya No, Nama Paket, Pagu Metode pemilihan ,Sumber dana, Kode RUP serta waktu pemilihan dan Memuat mengenai dokumen kontrak yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan pihak ketiga	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Sofcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselar.com
10	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pergeseran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.	Kasubag Program	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselar.com
11	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	Memuat rincian pendapatan dan rincian belanja serta target, output, indikator setiap uraian subkegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran	Kasubag Program	Benteng, 6 Maret 2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselar.com
12	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022	Menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.	Kasubag Keuangan	Benteng, Pertriwulan Tahun Berjalan	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselar.com



NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Rincian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024	Memuat informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdsela.yar.com
14	Neraca / laporan Posisi Keuangan Tahun 2024	Memuat bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitastersebut pada akhir periode tersebut	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdsela.yar.com
15	Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun 2024	Dokumen yang memuat rincian pendapatan Per SKPD	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdsela.yar.com
16	Rincian Realisasi Belanja Per SKPD Tahun 2024	Dokumen yang memuat rincian Belanja Per SKPD	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdsela.yar.com
17	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Merupakan Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdsela.yar.com
18	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022	Menggambarkan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran	Kasubag Program	Benteng, 26 Januari 2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdsela.yar.com
19	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024	Menggambarkan kinerja urusan yang ditangani dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.	Kasubag Program	Benteng, 20 Januari 2023	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdsela.yar.com



NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Memuat deskripsi dan penjelasan atas unsur-unsur yang tersaji pada lembar muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
21	Daftar aset dan Inventaris Tahun 2024	Dokumen yang memuat tentang Rincian Aset tetap	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
22	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Kabupaten Kepulauan tahun 2024	Memuat Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, Koreksi pada Ekuitas, dan Ekuitas (akhir) dikonsolidasikan dengan Laporan Perubahan Ekuitas PPKD yang terdiri dari Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, Koreksi pada Ekuitas, dan Ekuitas (akhir), menjadi Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Benteng	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
23	LHP-RI atas LKPD Tahun 2024	Dokumen yang berisikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Makassar	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
24	Opini BPKPD terhadap LKPD Tahun 2024	Dokumen yang berisikan tentang hasil penilaian laporan keuangan pemerintah daerah	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Makassar	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com



Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Januari 2025
an **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
Pit. KEPALA BADAN,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN, SE.M.Ak, M.Si
Pangkat : Pembina TK 1 .IV/b
NIP : 19830525 200604 1 016



LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

NOMOR : 900/ 12 / I/ 2025 / BPKPD

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

B. INFORMASI SERTA MERTA

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6		
	NIHIL	NIHIL					



Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 januari 2025
an. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
Plt KEPALA BADAN,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN,SE.M.Ak,M.Si
Pangkat : Pembina TK 1 .IV/b
NIP : 19830525 200604 1 016

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH****NOMOR : 900/ 12 / I/ 2025 / BPKPD****TENTANG****DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH****TAHUN ANGGARAN 2025****DAFTAR INFORMASI PUBLIK****C. INFORMASI SETIAP SAAT**

NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daftar Informasi Publik	Dokumen yang memuat tentang Informasi berkasla, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat dan Informasi yang dikecualikan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	Benteng,	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
2	Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 BPKPD	1 Pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Kasubag Program	Benteng, 23 September 2021	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 5 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
		2. Acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah					http://bpkpdselayar.com



NO	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Softcopy/Hardcopy)	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	LINK DOKUMEN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Parameter dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					http://bpkpdselayar.com
3	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen yang Memuat tentang Penjabaran APBD Tahun 2023	Kabid Anggaran Daerah	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
4	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen yang Memuat tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2025	Kabid Anggaran Daerah	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
5	Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024	Dokumen yang Memuat tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Tahun 2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com
6	LHP-BPK-RI terhadap LKPD	Dokumen yang berisikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabid Akuntansi dan Pelporan Keuangan Daerah	Makassar	Softcopy dan Hardcopy	Selama Berlaku Hingga 1 Tahun setelah masa berlaku habis	http://bpkpdselayar.com



Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Januari 2025

an **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
Plt. KEPALA BADAN,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN, SE.M.Ak.M.Si

Pangkat : Pembina TK 1 .IV/b

NIP : 19830525 200604 1 016



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 900/ 12 /I/ 2025 / BPKPD
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
TAHUN 2025

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECELIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (i)	Mengungkap Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Sampai dengan adanya Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
2	Laporan Keuangan Yang Belum di Audit (LRA,Neraca , CALK,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (i)	Dapat Menyebabkan penyalagunaan data yang tidak berhak	Kelancaran Proses Pemeriksaan	Sampai dengan terbitnya keuangan yang belum di audit
3	Dokumen Keuangan (SPJ,SPM,SP2D,SPP dll) yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (i)	Dapat Menyebabkan penyalagunaan data yang tidak berhak	Kelancaran Proses Pemeriksaan	Sampai dengan terbitnya keuangan yang belum di audit



Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Januari 2025

an **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
Pit. KEPALA BADAN,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NUKSAL IKHSAN,SE.M.Ak,M.:

Pangkat : Pembina TK 1 .IV/b
NIP : 19830525 200604 1 016